

**KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SORONG**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong

Antonius Arie Wibowo
NIP 19780902 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	51

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG,
JL. BASUKI RAHMAT KM.7 KOTA SORONG
TELEPON 0951 324868

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong

Antonius Arie Wibowo
NIP 19780902 200012 1 001

Laporan Keuangan Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.3.409.245.791 atau mencapai 69 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.967.879.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.635.061.362 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.708.123.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset disajikan sebesar Rp13.227.076.997 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp46.422.618; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.180.654.379; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban sebesar Rp28.145.408 dan nilai Ekuitas sebesar Rp13.198.931.589.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.547.466.560 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.852.073.776). Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) sebesar (Rp1.859.982.820) dan Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebesar Rp1.859.982.820 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp1.859.982.820).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp13.112.732.698 ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp1.859.982.820) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.773.783.929 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp13.198.931.539.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021		% thd Angg	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.967.879.000	3.409.245.791	68,63	2.803.863.000
JUMLAH PENDAPATAN		4.967.879.000	3.409.245.791	68,63	2.803.863.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	1.087.758.563
Belanja Barang	B.4	1.254.316.000	1.184.880.958	94,46	1.261.817.207
Belanja Modal	B.5	453.807.000	450.180.404	99,20	588.232.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		1.708.123.000	1.635.061.362	95,72	2.937.807.770

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	28.145.408	14.445.399
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	1.505.455
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	18.277.210	5.355.434
Jumlah Aset Lancar		46.422.618	21.306.288
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	8.801.994.000	8.801.994.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.475.981.637	4.025.801.233
Gedung dan Bangunan	C.16	3.862.703.000	3.862.703.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	365.826.000	365.826.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	15.590.690	15.590.690
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.341.440.948)	(3.966.334.070)
Jumlah Aset Tetap		13.180.654.379	13.105.580.853
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	589.935.229
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	(589.644.273)
Jumlah Aset Lainnya		-	290.956
JUMLAH ASET		13.227.076.997	13.127.178.097
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	28.145.408	14.445.399
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.145.408	14.445.399
JUMLAH KEWAJIBAN		28.145.408	14.445.399
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	13.198.931.589	13.112.732.698
JUMLAH EKUITAS		13.198.931.589	13.112.732.698
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.227.076.997	13.127.178.097

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.399.540.336	3.953.617.446
JUMLAH PENDAPATAN		3.399.540.336	3.953.617.446
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.087.758.563
Beban Persediaan	D.3	51.927.824	64.272.417
Beban Barang dan Jasa	D.4	757.686.954	776.450.429
Beban Pemeliharaan	D.5	193.606.934	200.598.987
Beban Perjalanan Dinas	D.6	169.137.970	208.716.717
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	375.106.878	328.408.768
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.547.466.560	2.666.205.881
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1.852.073.776	1.287.411.565
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar		7.909.044	23.797.000
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(637.300)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.909.044	23.159.700
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		1.859.982.820	1.310.571.265
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		1.859.982.820	1.310.571.265

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	13,112,732,698	12,723,281,045
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1,859,982,820	1,310,571,265
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1,773,783,929)	(921,119,612)
EKUITAS AKHIR	E.5	13,198,931,589	13,112,732,698

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong hingga saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berlokasi di Gedung Keuangan Negara Sorong, Jl. Basuki Rahmat Km. 7 Kota Sorong, Papua Barat – 98419, bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah dibentuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang,

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise</i> .	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

Uraian	TA 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.606.466.000	1.254.316.000
Belanja Modal	484.024.000	453.807.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	2.090.490.000	1.708.123.000

Realisasi
Pendapatan
Rp3.409.245.791

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.409.245.791 atau mencapai 68,63% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.967.879.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	8.200.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	4.000.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	632.964.808	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	2.758.154.984	-
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	-	4.420.544	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	1.505.455	-
Jumlah	-	3.409.245.791	-

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha TA 2021 mengalami penurunan sebesar 48,73% dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	12.200.000	23.797.000	(48,73)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	3.395.540.336	3.953.617.446	(14,12)
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	1.505.455	-	-
Jumlah	3.409.245.791	3.977.414.446	(14,28)

*Realisasi Belanja Negara
Rp1.635.061.362*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Semester TA 2021 adalah sebesar Rp1.635.061.362 atau 95,72% dari anggaran belanja sebesar Rp1.708.123.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.254.316.000	1.184.880.958	94,46
Belanja Modal	453.807.000	450.180.404	99,20
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.708.123.000	1.635.061.362	95,72

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 44,34% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN dan penurunan realisasi belanja barang pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	-	1.087.758.563	(100,00)
Belanja Barang	1.184.880.958	1.261.817.207	(6,10)
Belanja Modal	450.180.404	588.232.000	(23,47)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.635.061.362	2.937.807.770	(44,34)

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.087.758.563. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembayaran belanja pegawai dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pusat DJKN. Kebijakan tersebut berimplikasi pada realisasi belanja pegawai TA 2021 menjadi 0% dan penurunan sebesar 100% dari realisasi belanja TA 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	728.243.100	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	14.066	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	35.046.750	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	13.782.800	(100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	45.720.000	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	1.106.252	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	-	33.385.620	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	-	105.180.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	84.325.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	32.005.000	(100,00)
Belanja Lembur	-	8.950.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	1.087.758.588	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	1.087.758.588	(100,00)

Belanja Barang

Rp1.184.880.958

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp1.184.880.958* dan *Rp1.261.817.207*. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,27% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan turunnya belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja persediaan, dan belanja pemeliharaan sepanjang TA 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional	689.803.033	719.652.700	(4,15)
Belanja Barang Non Operasional	25.214.906	29.358.674	(14,11)
Belanja Jasa	42.669.015	35.755.332	19,34
Belanja Pemeliharaan	193.606.934	200.598.987	(3,49)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	169.137.970	208.716.717	(18,96)
Belanja Barang Persediaan	64.449.100	67.734.797	(4,85)
Jumlah Belanja Kotor	1.184.880.958	1.261.817.207	(6,10)

Belanja Modal

Rp450.180.404

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp450.180.404* dan *Rp588.232.000*. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan TA 2020 sebesar 23,47%

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.180.404	588.232.000,00	(23,47)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	450.180.404	588.232.000,00	(23,47)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	450.180.404	588.232.000	(23,47)

*Belanja Modal
Tanah
Rp0*

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal Tanah pada TA 2021.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp450.180.404*

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp450.180.404,-, mengalami penurunan sebesar 23,47% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp588.232.000.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.180.404,00	588.232.000,00	(23,47)
Jumlah Belanja Kotor	450.180.404,00	588.232.000,00	(23,47)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	450.180.404,00	588.232.000,00	(23,47)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 dan 2020.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 dan 2020.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	260.000.000	180.000.000	44,44
Jumlah Belanja Kotor	260.000.000	180.000.000	44,44
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	260.000.000	180.000.000	44,44

*Belanja Modal
Lainnya
Rp0*

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Lainnya pada TA 2021 dan 2020.

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyak daerah miskin.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik/ (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp28.145.408*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp28.145.408 dan Rp14.445.399.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas yang merupakan pendapatan Bunga Bank pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	TA 2021	TA 2020
-Kas Lainnya dan Setara Kas	28.145.408	14.445.399
Jumlah	28.145.408	14.445.399

Piutang PNBP

Rp0

C.4. Piutang PNBP

Saldo piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Uraian	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Uraian	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp0*

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	0		-
Jumlah Piutang Lancar	0	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-

*Belanja Dibayar di Muka
Rp0*

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.505.455. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Uraian	TA 2021	TA 2020
Belanja Dibayar di Muka	-	1.505.455
Jumlah	-	1.505.455

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0*

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang

Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Uraian	TA 2021	TA 2020
Pendapatan Masih Harus Diterima	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp18.277.618

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar *Rp18.277.618* dan *Rp5.355.434*. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Uraian	TA 2021	TA 2020
Persediaan	18.277.618	5.355.434
Jumlah	18.277.618	5.355.434

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar *Rp0* dan *Rp0*. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

Debitur	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

Debitur	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-

Tanah

C.14. Tanah

Rp0

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

Luas	Lokasi	Nilai
1.784 m2	Jl Jenderal Sudirman No.8, Kota Sorong	8.801.994.000
Jumlah		8.801.994.000

Peralatan dan

Mesin

Rp4.475.981.637

C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4.475.981.637 dan Rp4.025.801.233. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4.025.801.233
Mutasi tambah:	
Pembelian	578.063.968
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Non Revaluasi	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	127.883.564
Saldo per 31 Desember 2021	4.475.981.637

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) sebesar Rp313.000.000,-;
- b. Pembelian Mesin Fotocopy Electronic sebesar Rp28.000.000,-;
- c. Pembelian Kursi Besi/Metal sebesar Rp15.388.560,-;
- d. Pembelian AC Split sebesar Rp49.850.004,-;
- e. Pembelian Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebesar Rp99.845.004,-;
- f. Pembelian Dispenser sebesar Rp8.485.400,-;
- g. Pembelian *Uninterruptible Power Supply* (UPS) sebesar Rp11.000.000,-;
- h. Pembelian Digital LED *Running Text* sebesar Rp11.000.000,-;
- i. Pembelian Laptop sebesar Rp18.095.000,-;
- j. Pembelian Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp23.400.000,-;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. AC Split sebesar Rp49.995.000,-;
- b. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebesar Rp49.850.004,-
- c. Kursi Zeis sebesar Rp9.943.560,-
- d. Note Book sebesar Rp18.095.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.862.703.000*

C.16. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.862.703.000 dan Rp3.862.703.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	3.862.703.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2021	3.862.703.000

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp365.826.000*

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp365.826.000 dan Rp365.826.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	365.826.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Saldo per 31 Desember 2021	365.826.000

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan jalan, irigasi, dan jaringan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp15.590.690*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp15.590.690 dan Rp15.590.690. Aset Tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	15.590.690
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	15.590.690
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	15.590.690

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan aset tetap lainnya.

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.341.440.948*

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp3.691.267.666 dan Rp3.779.186.352. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.475.981.637	3.730.437.127	745.544.510
2	Gedung dan Bangunan	3.862.703.000	336.308.421	3.526.394.579
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	365.826.000	274.695.400	91.130.600
4	Aset Tetap Lainnya	15.590.690	-	15.590.690
Jumlah		8.720.101.327	4.341.440.948	4.378.660.379

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud **C.21. Aset Tak Berwujud**

Rp0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 Desember 2021.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan
-	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain
Rp0

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp589.935.229. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	589.935.229
Mutasi tambah:	
- Koreksi	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi	589.935.229
Saldo per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp589.644.273 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN

Rp0

C.24. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga

Rp0

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
Total	-	-

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0

C.26. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp28.145.408*

C.27. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar *Rp28.145.408* dan *Rp14.445.399*, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	TA 2021	TA 2020
Dana Pihak Ketiga	28.145.408	14.445.399
Jumlah	28.145.408	14.445.399

*Ekuitas
Rp13.198.931.589*

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp13.198.931.589* dan *Rp13.112.732.698*. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	13.198.931.589	13.112.732.698	86.198.891
Jumlah	13.198.931.589	13.112.732.698	86.198.891

Pendapatan PNB **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Rp3.409.245.791 **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp164.026.388,- dan Rp7.675.508,-. Pendapatan tersebut meningkat sebesar 2.037% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	12.200.000	23.797.000	(48,73)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	3.395.540.336	3.953.617.446	(14,12)
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	1.505.455	-	-
Jumlah	3.409.245.791	3.977.414.446	(14,28)

Pendapatan dari penjualan, pengelolaan bmn, iuran badan usaha berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, sementara pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan keuangan berasal dari pendapatan bea lelang oleh Kelas II, terakhir pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan denda lainnya per 31 Desember 2021.

Beban Pegawai **D.2. Beban Pegawai**

Rp0 Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.087.758.588. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	728.243.100	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	14.066	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	35.046.750	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	13.782.800	(100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	45.720.000	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	1.106.252	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	-	33.385.620	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	-	105.180.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	84.325.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	32.005.000	(100,00)
Belanja Lembur	-	8.950.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	1.087.758.588	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	1.087.758.588	(100,00)

Beban Persediaan **D.3. Beban Persediaan**

Rp51.927.824

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp51.927.824,- dan Rp64.272.417,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	51.927.824	64.272.417	(19,21)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	51.927.824	64.272.417	(19,21)

Beban Barang **D.4. Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa

Rp757.686.954

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp757.686.954 dan Rp776.450.429. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas

barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya pengurangan pada Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Barang Non Operasional Lainnya, dan Beban Sewa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	387.150.474	399.357.514	(3,06)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	8.043.866	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Satuan Kerja	53.753.804	65.280.779	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	47.478.737	30.644.841	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.230.000	154.012.500	(7,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	58.190.018	57.029.500	2,03
Beban Bahan	25.214.906	24.558.674	2,67
Beban Honor Output Kegiatan	-	4.500.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	300.000	(100,00)
Beban Langganan Telepon	20.156.015	16.722.755	20,53
Beban Sewa	-	-	0,00
Beban Jasa Profesi	1.800.000	3.800.000	(52,63)
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	20.713.000	12.200.000	69,78
Jumlah	757.686.954	776.450.429	(2,42)

Beban

Pemeliharaan

Rp193.606.934

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp193.606.934,- dan Rp200.598.987. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya perbedaan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dengan tahun sebelumnya. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA2020	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.606.934	200.598.987	(3,49)
Jumlah	193.606.934	200.598.987	(3,49)

Beban Perjalanan Dinas
Rp169.137.970,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp169.137.970,- dan Rp208.716.717,-. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya beban perjalanan biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	147.249.970	188.504.717	(21,89)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.888.000	20.212.000	8,29
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	
Jumlah	169.137.970	208.716.717	(18,96)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Beban Bantuan
Sosial
Rp0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada kenaikan atau penurunan per 31 Desember 2021. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp375.106.878

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp375.106.878 dan Rp328.408.768. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	234.908.727	193.790.671	21,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	84.130.051	78.259.040	7,50
Beban Penyusutan Irigasi	51.943.100	51.943.100	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	4.125.000	4.125.000	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	290.957	(100,00)
Jumlah Penyusutan	375.106.878	328.408.768	14,22
-	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp148.396.000

D.11.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.200.000	23.797.000	(65,54)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	290.956	-	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.192.310	(100,00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.829.610	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7.909.044	23.159.700	(65,85)

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp13.112.732.698

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.112.732.698 dan Rp12.723.281.045

Surplus LO

Rp549.411.555

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.859.982.820 dan Rp1.310.571.265. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
-	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp1.773.783.929

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing

sebesar Rp1.773.783.929 dan Rp921.119.612. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2021	2020	Naik (Turun) %
Ditagihkan Ke Entitas Lain	1.635.061.362	2.937.807.770	-44%
Diterima Dari Entitas Lain	(3.409.245.791)	(3.977.414.446)	-14%
Transfer Keluar	-	-	0%
Transfer Masuk	400.500	118.487.064	-100%
Jumlah	(1.773.783.929)	(921.119.612)	93%

Ekuitas Akhir

Rp13.198.931.589

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.198.931.589 dan Rp13.112.732.698.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	13.198.931.589	13.112.732.698	86.198.891
Jumlah	13.198.931.589	13.112.732.698	86.198.891

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan Agustus 2021 Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku mendapat tambahan pegawai sejumlah 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil. Penambahan SDM tersebut sangat dinanti-nanti karena dapat menunjang kinerja Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-6/KN/UP.11/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM. Akibat hal tersebut, terjadi penggantian Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut::

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong	Kuasa Pengguna Anggaran	Indra Eka Putra	Indra Eka Putra
	Pejabat Pembuat Komitmen	Iwan Susanto	Greetje Maritje Irene Mawaikere
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Yuzuardi Haban	Ade Setiana
	Bendahara Pengeluaran	Valensia Ririmasse	Valensia Ririmasse

LAMPIRAN DAN DAFTAR

A. Dokumen Pendukung Data Keuangan

1. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2021

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Desember 2021;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2021 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021 dan 2020.

2. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2020

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Desember 2020;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2020 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020 dan 2019.

B. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara

1. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2021;

- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari 2021 (Saldo Awal);
- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2021;

- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2021;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021.

2. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2020;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;

- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari (Saldo Awal) Tahun Anggaran 2020;
- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2020;
- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2020;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020.